



# POLICY BRIEF



**KEBIJAKAN SERAGAM GRATIS KOTA MAKASSAR SEBAGAI  
INOVASI LAYANAN PUBLIK DAN INVESTASI SOSIAL  
BERKELANJUTAN**

**DI SUSUN OLEH**

**TIM BRIDA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

## 1. Ringkasan Eksekutif

Kebijakan Seragam Gratis bagi siswa SD dan SMP di Kota Makassar merupakan inovasi pelayanan publik di sektor pendidikan yang berdampak ganda: memperluas akses pendidikan sekaligus memperkuat pemerataan sosial-ekonomi. Program ini telah:

1. Meningkatkan partisipasi dan kesetaraan pendidikan bagi keluarga berpenghasilan rendah.
2. Mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelibatan UMKK konveksi.
3. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik pemerintah daerah.

Namun, hasil evaluasi kolaboratif antara BRIDA Kota Makassar, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Negeri Makassar menunjukkan beberapa tantangan: keterlambatan distribusi, kompleksitas koordinasi lintas instansi, resistensi sebagian sekolah, perbedaan mutu produk, dan risiko keberlanjutan fiskal

Meskipun demikian, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen investasi sosial jangka panjang apabila diperkuat secara kelembagaan, digital, dan fiskal, sehingga dapat berlanjut lintas periode kepemimpinan daerah.

## 2. Latar Belakang dan Urgensi

Sebagai kota metropolitan di Indonesia Timur, Makassar menghadapi tantangan ketimpangan sosial-ekonomi dan urbanisasi yang berdampak pada akses pendidikan dasar. Walaupun sekolah negeri sudah bebas biaya, biaya non-akademik seperti pembelian seragam masih menjadi penghalang utama bagi keluarga miskin. Kebijakan Seragam Gratis dihadirkan bukan semata bantuan sosial, melainkan bentuk investasi sosial (social investment) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia jangka panjang. Menurut teori ekonomi pendidikan (Becker, 1964; Psacharopoulos & Patrinos, 2018), pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan memberikan social return berupa peningkatan produktivitas, penurunan kemiskinan, dan penguatan kohesi sosial.

**Selain itu, pelibatan UMKK konveksi sebagai penyedia seragam memberi efek ekonomi berganda (multiplier effect), memperluas lapangan kerja, dan memperkuat rantai pasok ekonomi daerah.**

### 3. Temuan Utama



#### a. Efektivitas Sosial-Ekonomi

Program berhasil meringankan beban ekonomi keluarga miskin, meningkatkan kehadiran dan motivasi belajar siswa, serta memperkuat kesetaraan sosial di sekolah.

#### b. Keterlambatan Produksi dan Distribusi

Sebagian UMKK belum siap memenuhi skala produksi massal dan standar waktu distribusi yang ditetapkan pemerintah.



#### c. Kompleksitas Koordinasi Lintas Dinas

Banyaknya lembaga terlibat (Dinas Pendidikan, Koperasi, ULP, Inspektorat, BRIDA) menyebabkan proses pengadaan panjang dan berlapis.

#### d. Resistensi dari Pihak Sekolah

Sebagian sekolah menunjukkan penolakan pasif terhadap larangan menjual seragam, menandakan perlunya pendekatan komunikasi dan sosialisasi yang lebih persuasif.



#### e. Kualitas dan Ukuran Seragam

Masih ditemukan variasi mutu kain dan ketidaktepatan ukuran akibat lemahnya sistem pengawasan dan verifikasi data ukuran siswa.

#### f. Keberlanjutan Fiskal

Program masih bergantung pada efisiensi APBD tahunan. Ketergantungan ini berisiko tinggi terhadap perubahan politik dan prioritas fiskal bila kepala daerah berganti

## 4. Analisis Kebijakan

Pendekatan Collaborative Governance menegaskan bahwa inovasi publik akan berkelanjutan bila melibatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha lokal. Dalam konteks Program Seragam Gratis Kota Makassar, keberlanjutan dapat dijaga apabila empat elemen utama terpenuhi:

- a. Kelembagaan yang kuat dan terkoordinasi, melalui sinergi lintas dinas agar pelaksanaan program konsisten meski terjadi pergantian kepala daerah.
- b. Kapasitas pelaku lokal (UMKK) yang adaptif dan tersertifikasi, untuk menjamin mutu dan kontinuitas produksi.
- c. Transparansi berbasis data digital, guna memperkuat akuntabilitas publik serta pengawasan real time.
- d. Pelembagaan hukum dan fiskal, melalui Peraturan Daerah dan penganggaran multiyear agar program tetap berjalan lintas periode pemerintahan.

Pemenuhan keempat aspek tersebut menjadikan kebijakan Seragam Gratis berdampak sosial dan ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus menjadi model inovasi pelayanan publik daerah yang tahan terhadap perubahan politik.

## 5. Rekomendasi Kebijakan dan Rencana Aksi

### a. Penguatan Tata Kelola Kolaboratif

#### Rekomendasi:

Membentuk Task Force Seragam Gratis lintas instansi (Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, ULP, Inspektorat, BRIDA, UMKK, dan sekolah) di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

#### Rencana Aksi:

- Rapat koordinasi lintas dinas secara rutin selama masa pengadaan dan distribusi.
- Membangun real-time dashboard untuk pemantauan produksi dan pelaporan publik
- Menunjuk focal point antarinstansi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan menghindari tumpang tindih kebijakan.

### b. Peningkatan Kapasitas UMKK dan Standardisasi Produk

#### Rekomendasi:

Membentuk Task Force Seragam Gratis lintas instansi (Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, ULP, Inspektorat, BRIDA, UMKK, dan sekolah) di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

#### Rencana Aksi:

- Pelatihan produksi dan pengendalian mutu.
- Sertifikasi produk dan pendampingan legalitas usaha (NIB, label SNI).
- Kolaborasi production partnership antara UMKK kecil dan konveksi menengah

### c. Pelembagaan Fiskal dan Keberlanjutan Program

#### **Rekomendasi:**

Menjadikan program Seragam Gratis sebagai kebijakan permanen lintas periode kepemimpinan daerah melalui instrumen hukum dan fiskal yang mengikat.

#### **Rencana Aksi:**

- Menetapkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum tetap program agar tidak bergantung pada kebijakan kepala daerah yang sedang menjabat.
- Mengintegrasikan program ke dalam APBD reguler dan RPJMD, memastikan keberlanjutan fiskal jangka menengah.
- Menerapkan Medium Term Expenditure Framework (MTEF) selama 5 tahun agar pendanaan tidak terputus saat terjadi pergantian kepala daerah.
- Membentuk mekanisme transisi kebijakan antarperiode dengan supervisi BRIDA untuk menjaga konsistensi program.
- Mengembangkan diversifikasi pendanaan melalui CSR, kemitraan provinsi, dan lembaga filantropi

### c. Pelembagaan Fiskal dan Keberlanjutan Program

#### **Rekomendasi:**

Mengembangkan kebijakan lanjutan berupa bantuan non-akademik (tas, sepatu, perlengkapan belajar) bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

#### **Rencana Aksi:**

- Pilot project bantuan perlengkapan sekolah berbasis CSR.
- Evaluasi tahunan terhadap dampak sosial dan partisipasi siswa

## 6. Kesimpulan

Kebijakan Seragam Gratis Kota Makassar merupakan inovasi publik berorientasi keadilan sosial yang efektif dalam meningkatkan akses pendidikan dan memberdayakan ekonomi lokal. Untuk memastikan keberlanjutannya lintas periode pemerintahan, kebijakan ini harus:

- Dipelembagakan melalui Peraturan Daerah dan MTEF.
- Diperkuat secara digital dan kolaboratif.
- Dibiayai melalui mekanisme multiyear dan sumber pendanaan beragam.

Fondasi hukum, fiskal, dan kelembagaan yang kokoh menempatkan Kota Makassar sebagai contoh nasional dalam penerapan tata kelola pendidikan yang transparan, inklusif, serta berkelanjutan.